



**PENERAPAN NILAI-NILAI TRANSPARANSI
DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TENILO
KECAMATAN TILAMUTA KABUPATEN BOALEMO**

Lista Ristiani Yunus¹, Arifin Tahir², Irawaty Igirisa³

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia ¹²³

e-mail: itaristiany@gmail.com¹, Arifin_tahir@ung.ac.id², Irawatyigirisa@ung.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to find out and describe (1) the application of transparency values in the management of village fund allocation in Tenilo village, Tilamuta District, Boalemo Regency (2) the factors that determine the success of the implementation of transparency values seen from the aspects of OPD success, provision of financial information, provision of access, information on government accounting standards, an overview of financial performance. The approach used is qualitative with a type of descriptive research. Data collection uses observation and in-depth interviews.

The results of this study show that (1) The implementation of the values of transparency in village fund allocation in Tenilo village, Tilamuta District, Boalemo Regency cannot be said to be optimal. referring to Mustopa Didjaja's theory that the values of transparency are four important points, (a) information disclosure, (b) procedure disclosure, (c) register/policy openness (d) openness to accept the role of the community. From these points, information disclosure has not been maximally implemented, as well as register/policy disclosure. Then for the openness of procedures and openness to accept the role of the community is quite good. (2) Factors that determine the success of the management of village fund allocation in Tenilo village, Tilamuta District, Boalemo Regency in this case refer to the theory of Ridha and Basuki which states that the determining factors for success are information on the success of OPD, provision of financial information, provision of access, disclosure of government accounting standards, presentation of financial overview. From these several points, the results of the study show that information on the success of OPD has an effect on the community, the provision of financial information has also been carried out, the disclosure of accounting standards has also been good, but the provision of access has not been maximized and even does not exist in Tenilo village. Since the beginning, researchers have observed and interviewed the community, they stated that the availability of access such as billboards, social media, or village websites is not held by the village government, this certainly makes it difficult for the community to receive or find information related to the details of the use of village fund allocation in their own village. Likewise, the presentation of the financial overview which is still often late is presented by the Tenilo village government.

Keywords: *Transparency Value, Village Fund Allocation.*

PENDAHULUAN

Pemendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 2, keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas transparan dan juga akuntabel dapat mengklaim akses kebebasan kepada warga desa untuk memperoleh info mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu info perihal kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya dan hal-hal yang akan di capai. Berdasarkan asas akuntabel yang telah tertuang dalam peraturan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentunya harus benar-benar di terapkan dan harus mendapat perhatian serius dari seluruh *stake holders* yang berada di desa itu sendiri, baik pemerintah ataupun masyarakat guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa, namun hal ini lebih di titik beratkan pada mereka yang mempunyai kekuasaan di desa yaitu pemerintah desa, karena apabila melihat dari banyaknya kasus-kasus yang menjerat banyak penyelenggara pemerintah desa, di indonesia tidak sedikit terletak pada ketidak transparannya pengelolaan keuangan yang ada di desa itu sendiri.

Setiap desa di berikan alokasi dana desa (ADD) di setiap tahunnya dengan jumlah tertentu untuk pembangunan desa itu sendiri. Dana tersebut bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan

pemerintah pusat dan daerah yang di terima pemerintah kabupaten. Alokasi dana desa (ADD) adalah dalam rangka mempertinggi pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, Provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi serta pusat perlu merealisasikan dana APBD masing-masing sebesar 10% di berikan untuk dana alokasi dana desa (ADD).

Penyusunan alokasi dana desa (ADD) merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong terciptanya *good governance*. *Good governance* yang sering diartikan adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik. *good governance* juga merupakan cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, aturan hukum.

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Alokasi dana desa yang baik Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo mengeluarkan peraturan Bupati nomor 12 tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian, pengorganisasian, penggunaan, pengawasan, evaluasi alokasi dana desa, dan pendapatan daerah dan retribusi daerah, dimana peraturan tersebut menjadi acuan dari seluruh desa

yang berada di kabupaten boalemo, khususnya di Desa Tenilo, kecamatan Tilamuta yang tentunya.

Tabel 1.1
Besaran Alokasi Dana Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo 5 tahun terakhir

Tahun	Jumlah
2018	Rp 418.555.000,00
2019	Rp 418.555.000,00
2020	Rp 418.555.000,00
2021	Rp 418.555.000,00
2022	Rp 418.555.000,00

Sumber: Pemerintah Desa Tenilo, 2022

Dari tabel di atas merupakan gambaran besaran rincian penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang oleh desa Tenilo di tahun 2018-2022. Dimana jumlah pagu yang di terima oleh desa tenilo tidak pernah berubah selama lima tahun terakhir sebesar Rp. 418.555.000. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa untuk mencapai pembangunan nasional. Berdasarkan hasil observasi awal yang di temui oleh peneliti ketika di lapangan, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini bisa dilihat dari, *pertama*, tidak ada bentuk transparansi dari pemerintah desa terhadap masyarakat dalam penggunaan alokasi dana desa dalam bentuk keterbukaan informasi yang dapat di sampaikan melalui papan pengumuman, papan informasi, ataupun media informasi lainnya yang

dapat di akses oleh masyarakat. Hal ini di buktikan sesuai dengan pernyataan kepala desa bahwa untuk pembuatan papan informasi tidak sempat di anggarakan, sehingganya sampai dengan saat ini papan informasi tersenut tidak terpampang di halaman kantor desa tenilo. padahal telah dijelaskan dalam peraturan Permendagri nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 40 yang berbunyi “laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana di maksud dalam pasal 37 dan 38 di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media inormasi yang mudah di akses oleh masyakat”.

Kedua, masih mengenai publikasi anggaran, banyak masyarakat belum mengetahuiserta tidak paham mengenai berapa anggaran alokasi dana desa yang di releasasikan oleh pemerintah desa. hal ini dapat menunjukkan bahwa sikap transparansi pemerintah desa ke masyarakat kesannya tertutup dan tidak di buka luas ke masyarakat. hal inilah yang dapat menyebabkan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga sekaligus rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang di biayai oleh desa.

Ketiga, kurangnya keterbukaan informasi pemerintah desa dalam pengalokasian alokasi dana desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan alokasi dana desa. Dimana BPD ini tugasnya adalah lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa diantaranya adalah pengawasan terhadap

penggunaan alokasi dana desa. Hal ini di buktikan dengan pernyataan oleh salah satu anggota BPD yaitu kurangnya penyampaian informasi dalam penggunaan anggaran ke BPD, bahkan anggota BPD tersebut tidak tau jika anggaran tersebut telah di pakai untuk kegiatan apa saja.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif analisis kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan representasi keseluruhan tentang suatu hal, menurut pandangan dari manusia yang di teliti. Pendekatan kualitatif ini juga berhubungan dengan pendapat, persepsi, ide atau kepercayaan semua hal yang tidak dapat di hitung dengan angka. . Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti yakni (a) Observasi, alat pengumpul data dalam penelitian ini yakni melalui panduan observasi, dilakukan pengamatan dan penelusuran di lapangan terhadap penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. (b) Wawancara Mendalam (*Interview*), alat pengumpulan data dalam penelitian ini yakni pedoman wawancara. Melakukan wawancara dengan informan terkait dengan penerima program tersebut. Wawancara in dilakukan dengan cara menggunakan alat perekam suara *tape-recorder* guna menjamin hasil rekaman dari informan terkait semua informasi penting yang diungkapkannya. (c) Dokumentasi, alat pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dari pencatatan dokumen.

Metode ini digunakan untuk menjangring informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen, seperti kebijakan tertulis, mekanismen dan prosedur atau informasi lainnya terkait dengan penerapan nilai-nilai dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Tenilo, kecamatan Tilamuta, kabupaten Boalemo.

Analisis data dalam penelitian ini dapat berupa cerita rinci para informan sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka, kemudian teknik analisis data juga berupa pembahasan seperti diskusi antara data temuan dengan teori-teori yang digunakan. Neong Muhadjir (1198) (dalam Ahmad Rijali 2018: 84) berpendapat bahwa analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Miles dan Huberman (dalam Mely Novasari Harahap 2021: 2646) Teknik Analisis Data terdiri dari data *Reduction*, data *Display* dan *Conclusion Drawing/verification*.

Secara berurut teknik analisis data dilakukan melalui tahapan diantaranya sebagai berikut: (a) Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. (b) Penyajian data, dalam teknik ini peneliti telah melakukan penyajian sekumpulan informasi

berdasarkan fokus dan sub fokus sehingga pada akhir uraian memudahkan peneliti merumuskan kesimpulan. (c) Verifikasi atau penarikan kesimpulan. Setelah hasil penelitian di susun, maka peneliti membuat rumusan kesimpulan dari setiap fokus dan sub fokus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Tenilo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo dilihat dari (a) keterbukaan informasi, (b) keterbukaan prosedur, (c) keterbukaan regulasi (d) keterbukaan menerima peran masyarakat. kemudian dengan faktor yang menentukan keberhasilan di lihat dari aspek, (a) informasi keberhasilan OPD, (b) penyediaan informasi keuangan, (c) penyediaan akses, (d) informasi standar akuntansi pemerintahan, (e) ikhtisar kinerja keuangan.

Keterbukaan Informasi

Adapun hasil penelitian yang di temukan di desa Tenilo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo adalah untuk keterbukaan informasi mengenai alokasi dana desa sudah ada dengan di laksanakannya musyawarah dusun dan musyawarah desa yang menjadi wadah untuk pemerintah desa untuk menyampaikan informasi tentang alokasi dana desa di setiap tahunnya yang sudah pasti melibatkan masyarakat. namun hal lain di temukan oleh peneliti yaitu pada saat musyawarah tersebut tidak semua di sampaikan

oleh aparat desa ke masyarakat, aparat desa beranggapan bahwa masyarakat tidak perlu banyak mengetahui tentang alokasi dana desa yang kemudian hal ini sejalan dengan pernyataan informan yang di temukan oleh peneliti yakni masyarakat desa tenilo, mereka berpendapat bahwa belum tau bahkan tidak tau mengenai alokasi dana desa. Mereka kurang mengetahui kegiatan ataupun program yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak keterbatasan masyarakat desa Tenilo untuk memperoleh informasi mengenai keuangan desa yakni alokasi dana desa.

Keterbukaan Prosedur

Adapun hasil penelitian yang di temukan oleh peneliti di desa Tenilo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo mengenai keterbukaan prosedur alokasi dana desa sudah ada dan sudah di jalankan. Hal ini sejalan dengan adanya musyawarah yang di laksanakan oleh aparat desa dengan melibatkan masyarakat yang kemudian musyawarah inilah yang menjabatani aparat desa untuk menyampaikan prosedur maupun proses pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa Tenilo ke masyarakatnya.

Keterbukaan Kebijakan

Adapun hasil penelitian yang di temukan oleh peneliti bahwa untuk keterbukaan kebijakan di Desa Tenilo di upayakan oleh pemerintah desa itu sendiri, namun memang untuk kebijakan alokasi dana desa beberapa kali sering di ubah, atau kebijakan yang di buat itu tidak di implementasikan justru malah mengganti dengan

program lain tanpa melalui musyawarah, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor, di antaranya adalah ada sesuatu yang secara tiba-tiba terjadi yang mengharuskan pemerintah desa mengubah kebijakan tersebut.

Keterbukaan terhadap peran masyarakat

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo mengenai alokasi dana desa sering melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya dalam hal ini artinya keterbukaan terhadap peran masyarakat sudah ada dan di jalankan yang di mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. hal ini bisa di buktikan dengan adanya pelaksanaan musyawarah dusun dan musyawarah desa yang di laksanakan setiap tahunnya dan sudah pasti melibatkan masyarakat.

Informasi Keberhasilan OPD

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo bahwasanya mengenai informasi keberhasilan OPD sangat berpengaruh ke masyarakat desa Tenilo itu sendiri, pencapaian keberhasilan aparat desa Tenilo dalam mengelolah alokasi dana desa sangatlah penting dan masyarakat bisa melihat serta merasakan dampak dari keberhasilan aparat desa secara langsung. Selain itu program yang direalisasikan oleh aparat desa merupakan program usulan serta kebutuhan masyarakat desa Tenilo.

Penyediaan informasi keuangan

Hasil penelitian yang di lakukan di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo bahwasanya mengenai informasi keuangan sudah ada dengan di laksanakan rapat akhir tahun atau lebih di kenal dengan surat pertanggungjawaban (SPJ). Pada saat rapat tersebut pemerintah desa mengundang masyarakat dan menyaksikan secara langsung informasi keuangan yang disampaikan oleh aparat desa. kemudian untuk penyediaan informasi keuangan desa tenilo juga di masukan ke pemerintah kecamatan, dinas sosial dan juga badan keuangan dan asset daerah berupa dokumen yang dapat di akses oleh instansi tersebut. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa penyediaan informasi keuangan di desa Tenilo sudah baik dan sudah di laksanakan.

Penyediaan akses

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tenilo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo bahwasanya mengenai ketersediaan akses berupa baliho, papan pengumuman, sosial media dan website desa bisa di katakan tidak ada. Dari hasil wawancara bersama masyarakat desa Tenilo mereka tidak pernah melihat baliho alokasi dana desa yang terpampang di halaman kantor desa, namun aparat desa tenilo justru mereka mengatakan bahwa untuk baliho sempat di buat hanya saja hanya bertahan paling lama 1 minggu, setelah itu rusak dan tidak di anggaran kembali padahal jika pernah benar-benar di buat, seharusnya ada bekas baliho yang terlihat. namun masyarakat

tidak pernah melihat bekasnya. Begitupun dengan peneliti yang sempat kuliah kerja nyata (KKN) selama 4 bulan di desa tersebut, peneliti tidak pernah melihat bekas baliho alokasi dana desa di kantor desa tersebut. Lalu kemudian untuk media platform lainnya seperti social media dan website desa tidak ada di desa Tenilo, hal ini sejalan dengan pernyataan aparat desa dan juga masyarakat.

Tidak adanya ketersediaan akses informasi alokasi dana desa yang ada di Desa Tenilo menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai besaran anggaran kegiatan yang di anggarakan ke dalam keuangan desa yakni alokasi dana desa kemudian hal ini juga menyebabkan informasi mengenai alokasi dana desa terkesan sangat tertutup seolah-olah aparat desa Tenilo tidak ingin masyarakatnya mengetahui tentang keuangan desanya sendiri.

Informasi standar akuntansi pemerintahan

Hasil penelitian yang di lakukan di desa Tenilo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo bahwa untuk pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa sudah menggunakan mengikuti perkembangan teknologi dengan menggunakan aplikasi yang bernama sistem informasi keuangan desa atau sering di singkat siskeudes, di dalam aplikasi tersebut sudah memuat standar akuntansi pemerintahan seperti input kegiatan, pendapatan, neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran,

laporan operasional dan lain-lain. dapat di simpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan yang ada di desa Tenilo sudah baik.

Ikhtisar kinerja keuangan

Hasil penelitian yang di lakukan di desa Tenilo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo bahwa untuk laporan keuangan yang di buat oleh pemerintah desa Tenilo di setiap tahunnya itu ada dua kali, dan ketika tahap pertama terlambat, maka akan terlambat pula untuk realisasi anggaran alokasi dana desa berikutnya atau tahap dua. Kemudian untuk laporan keuangan itu selalu di buat berdasarkan pedoman yang ada, hanya saja untuk waktu pembuatan laporan keuangan oleh aparat desa Tenilo masih seringkali terlambat dan tidak tepat waktu karena beberapa kendala yang tiba-tiba terjadi dan hal ini tentunya berpengaruh ke tahap dua alokasi dana desa.

Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Suci Indah Hanifah (2015) laporan keuangan desa merupakan suatu bentuk transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya pertanggungjawaban yang berupa keterbukaan pemerintah desa terhadap aktivitas ataupun kegiatan yang di gunakan dengan memanfaatkan keuangan desa, khususnya alokasi dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti bahwa hal tersebut belum maksimal. di karenakan di lihat dari teori Mustopa Didjaja (2003) yang menyatakan bahwa nilai-nilai transparansi

adalah mencakup keterbukaan informasi, keterbukaan prosedur, keterbukaan kebijakan serta keterbukaan menerima peran masyarakat. (1) Keterbukaan informasi mengenai alokasi dana desa di desa tenilo yang telah di lakukan penelitian hasilnya sudah dan sudah di lakukan dengan di laksanakan forum musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat namun aparat desa Tenilo sendiri mengakui bahwa tidak semua informasi terkait alokasi dana desa itu di sampaikan ke masyarakat. hal ini tentu mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desanya sendiri. (2) keterbukaan prosedur pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa Tenilo hasil penelitiannya sudah baik dan sudah di laksanakan dengan adanya musyawarah dengan mengundang masyarakat. dalam musyawarah itulah di sampaikan prosedur pelaksanaan alokasi dana desa. (3) keterbukaan kebijakan di Desa Tenilo di upayakan oleh pemerintah desa itu sendiri, namun memang untuk kebijakan alokasi dana desa beberapa kali sering di ubah, atau kebijakan yang di buat itu tidak di implementasikan justru malah mengganti dengan program lain tanpa melalui musyawarah, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor, di antaranya adalah ada sesuatu yang secara tiba-tiba terjadi yang mengharuskan pemerintah desa mengubah kebijakan tersebut. (4) Keterbukaan menerima peran masyarakat saat pengelolaan alokasi dana desa di desa Tenilo sudah melibatkan dan sudah pasti menerima peran masyarakat karena pemerintah desa

juga menyampaikan bahwa masyarakatnya sendiri yang lebih tau kebutuhan yang mereka inginkan untuk pembangunan desanya sendiri. dari hasil penelitian berdasarkan teori Mustopa Didjaja dengan sub fokus 4 poin di atas dapat di lihat bahwa penerapan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa Tenilo belum berjalan maksimal dan perlu adanya peningkatan guna mencapai tata pemerintahan yang baik.

Faktor yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa Tenilo berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti belum maksimal atau belum begitu baik. hal ini dapat di lihat dari teori Ridha dan Basuki yang mengemukakan bahwa faktor keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa yakni Informasi keberhasilan OPD, penyediaan informasi keuangan, penyediaan akses, mengungkapkan informasi standar akuntansi pemerintahan, dan menyajikan ikhtisar kinerja keuangan. (1) Informasi keberhasilan OPD mengenai pengelolaa alokasi dana desa di Desa Tenilo sangat berpengaruh ke masyarakat desa Tenilo, hal ini dapat di lihat jika pemerintah desa mampu merealisasikan sebuah kegiatan yang di butuhkan masyarakat, masyarakat juga ikut berpartisipasi dan juga dapat meningkatkan semangat masyarakat desa Tenilo. Penyediaan informasi keuangan sudah ada dan di laksanakan di desa Tenilo melalui rapat akhir tahun yang dikanel dengan SPJ dan pada saat rapat tersebut pemerintah desa menyampaikan informasi

keuangan. (3) Penyediaan akses transparansi pengelolaan alokasi dana desa yang ada di desa Tenilo bisa di katakan tidak ada. hal ini dapat di lihat dari tidak adanya baliho, papan informasi, media sosial mapun website desa yang menyediakan informasi anggaran yang di anggarakan ke program maupun kegiatan dengan memanfaatkan alokasi dana desa. hal ini tentu berdampak ke masyarakat yang akhirnya mereka tidak mendapatkan informasi mengenai jumlah anggaran persetiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa. (4) mengungkapkan informasi standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan alokasi dana desa sesuai hasil penelitian bahwa pemerintah desa tenilo dalam mengelolah keuangan desa khususnya alokasi dana desa sudah menggunakan akuntansi pemerintahan dengan menggunakan aplikasi yang di kena dengan siskeudes (sistem informasi keuangan desa) yang dimana di dalam aplikasi tersebut sudah memuat akuntansi pemerintahan. (5) Menyajikan Ikhtisar kinerja keuangan yang ada di desa Tenilo dengan hasil penelitian bahwa laporan keuangan yang di buat oleh pemerintah desa di lakukan setiap 2 periode dalam satu tahun dengan mengikuti pedoman yang sudah ada, dan laporan keuangan tersebut di peruntukkan ke pemerintah kecamatan, dinas sosial, badan keuangan dan asset daerah. namun pemerintah desa Tenilo seringkali terlambat dalam pembuatan laporan keuangan hal ini tentu berpengaruh untuk realisasi tahap berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Igirisa, Irawaty. (2022) *Kebijakan Publik*. Tanah Air Beta
- Tahir, Arifin (2020) *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: CV Alfabeta
- Jurnal**
- Anggi Restiani, Syaefuddin, Lulu Yuliani, D. K. (2018). Penerapan Pendidikan Kesadaran Beragama Melalui Pengajian Mingguan. *Cendekiawan Ilmiah PLS*, 3(1), 12.
- Anugrah, A., Mahsyar, A., & Burhanuddin, B. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gowa 2020. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(1), 53–63.
<https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5391>
- Emmett Grames. (2020). 18(1), 14.
<https://all3dp.com/2/fused-deposition-modeling-fdm-3d-printing-simply-explained/>
- Harahap, M. novasari. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman. 18(1), 2463–2653.
<http://jurnal.staiuisu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/5/9>
- Herman, & Ilham. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sanggumanai Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (2), 1-17
<http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/19242>
- Loka, W. P., Sumadja, W. A., & Resmi. (2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(2), 1689–1699.
[https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance Notebook 2.6 Smoke.pdf](https://www.oecd.org/dac/accountable-effective-institutions/Governance%20Notebook%202.6%20Smoke.pdf)
- Mentari Tumbel, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa

- Di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–21.
- Mohi, W. K., Alkatiri, R., & Otoluwa, D. (2019). Journal of Public Administration and Government Kemampuan Aparat Dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Monano Kabupaten Gorontalo Utara The Capability of the Officials in Managing Village Funds (ADD) in Monano Village , North Gorontalo District. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 35–43.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119–130.
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89–105. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>
- Sri Wahyuni Nur1, F. (2012). Pengaruh Profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit atas laporan keuangan. *jurnal ekonomi dan informasi akuntansi. Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3 (1), 1–9.
- Suci Indah Hanifah, & Sugeng Praptoyo. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Sukwani, D. F., Kusuma, D. W., & Sari, N. K. (2021). Implementasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add). *Jakuma : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 2(1), 37–48. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v2i1.515>
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14 (1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20904.2018>
- Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Bupati Boalemo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengorganisasian, Penggunaan, Pengawasan, Evaluasi Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Daerah Dan Restribusi Daerah